

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN DAN DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL-EKONOMI PADA KOMUNITAS NELAYAN PESISIR: STUDI KASUS DESA SENTELUK, KABUPATEN LOMBOK BARAT

Natila Rizka Safitri, Lalu Moh. Nazar Fajri, Nining Ayu Septiani, Miftahul Jannah, Ardi Sudarman Azis, Aipan Saepanni, M. Suryana, M. Fadhil Maulana

UNIVERSITAS NAHDALTUL WATHAN MATARAM

natilarizka@gmail.com, nazarfajri8@gmail.com,
niningayuseptiani@gmail.com, miftahuljannahkkt@gmail.com,
ardisudarmanazis@gmail.com, muhammadsuryana2021@gmail.com,
fadilmaulana79575@gmail.com

Abstract

This study analyzes the implementation of environmental policies and the distribution of socio-economic assistance to fishing communities in Senteluk Village, West Lombok Regency. A qualitative approach is used through in-depth interviews, field observations, and document studies to understand the experiences of recipients and non-recipients. The results of the study show that assistance programs, such as the provision of production facilities and support for coastal MSMEs, provide real benefits to some fishermen, but access is not fully equitable due to limited quotas, administrative capacity, and the influence of social networks. This inequality creates a perception of injustice and has the potential to weaken the legitimacy of village governance. This study confirms that the success of public policies in coastal areas is not only determined by the existence of programs, but also by transparency, meaningful participation, and fair distribution of benefits for fishing communities.

Keywords : Environmental Policy; Coastal Fishermen; Socio-Economic Assistance; Distribution Fairness; Village Governance



A. Introduction

Wilayah pesisir memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, dan keberlanjutan ekologi. Namun, masyarakat nelayan tradisional yang menggantungkan hidup pada sumber daya laut berada dalam posisi sosial-ekonomi yang rentan akibat ketidakpastian cuaca, fluktuasi hasil tangkapan, serta lemahnya akses terhadap modal dan kebijakan publik.¹ Kerentanan ini tidak hanya disebabkan faktor alamiah, tetapi juga struktur sosial dan kelembagaan yang menempatkan nelayan pada posisi tawar rendah dalam relasi ekonomi dan governance lokal.²

Dalam kerangka desentralisasi, pemerintah daerah dan desa memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan pesisir dan program pemberdayaan masyarakat. Kebijakan lingkungan idealnya diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan sosial (Dahuri, 2003). Namun, keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di tingkat lokal, meliputi kejelasan prosedur, kapasitas kelembagaan, serta relasi antara pemerintah dan warga.³

Desa Senteluk di Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu wilayah pesisir dengan dominasi nelayan tradisional. Pemerintah desa bersama dinas terkait telah melaksanakan program bantuan sosial-ekonomi, seperti penyediaan sarana produksi perikanan dan dukungan

¹ Fauzi, A. (2010). Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan: Teori dan aplikasi. Gramedia Pustaka Utama. Lihat juga Kusnadi. (2007). Kemiskinan nelayan: Problem dan upaya pemberdayaannya. Graha Ilmu.

² Retnowati, E. (2011). Dinamika kemiskinan nelayan dalam perspektif sosial budaya. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 24(2), 101–111

³ Hill, M., & Hupe, P. (2014). Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance (3rd ed.). SAGE Publications



UMKM pengolahan hasil laut. Meski demikian, sebagian nelayan mengemukakan adanya ketimpangan akses terhadap bantuan. Perbedaan akses ini berpotensi memunculkan kecemburuan sosial dan menurunkan legitimasi governance apabila tidak dikelola secara transparan dan inklusif.⁴

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini menganalisis: (1) bagaimana implementasi kebijakan lingkungan dan distribusi bantuan sosial-ekonomi pada komunitas nelayan Desa Senteluk; (2) bagaimana dampaknya terhadap kondisi sosial-ekonomi nelayan; dan (3) faktor-faktor yang mendukung atau menghambat distribusi bantuan dalam kerangka governance desa. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, dengan menempatkan pengalaman dan persepsi pelaku lokal sebagai sumber data utama.⁵

Secara akademik, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian implementasi kebijakan publik di wilayah pesisir dengan menekankan dimensi keadilan distribusi dan collaborative governance. Secara praktis, temuan penelitian diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan untuk merancang tata kelola bantuan yang lebih transparan, partisipatif, dan adaptif terhadap kerentanan struktural masyarakat nelayan.

B. Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami implementasi kebijakan lingkungan dan distribusi bantuan sosial-ekonomi pada komunitas nelayan Desa Senteluk secara

⁴ Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

⁵ Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.



kontekstual. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan pada pengukuran statistik, tetapi pada makna sosial, pengalaman warga, dan dinamika governance lokal.⁶

1. Lokasi dan Informan Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pantai Tanjung Bias, Desa Senteluk, Kabupaten Lombok Barat. Informan dipilih menggunakan purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dalam aktivitas perikanan dan program bantuan (Patton, 2015). Mereka meliputi perangkat desa, nelayan tradisional, pelaku UMKM pesisir, dan warga penerima maupun non-penerima bantuan. Jumlah informan disesuaikan hingga tercapai saturasi data, yaitu ketika wawancara tidak lagi menghasilkan informasi baru yang signifikan

2. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui:

- a. wawancara mendalam mengenai pengalaman memperoleh atau tidak memperoleh bantuan, persepsi keadilan distribusi, dan praktik governance desa;
- b. observasi lapangan atas kondisi sosial-ekonomi dan aktivitas nelayan;
- c. studi dokumen, seperti data program bantuan dan kebijakan desa.

Kutipan wawancara digunakan untuk mendukung temuan empiris, dengan menjaga kerahasiaan identitas informan.

3. Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis tematik, dimulai dari reduksi data, pengelompokan tema (implementasi kebijakan, akses bantuan, kerentanan, dan governance), serta interpretasi kritis yang mengaitkan

⁶ Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research and evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.



temuan dengan teori kerentanan nelayan, implementasi kebijakan, collaborative governance, dan keadilan distribusi.

4. Keabsahan Data dan Etika

Keabsahan temuan dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, member checking terbatas, serta dokumentasi proses penelitian. Penelitian menjunjung informed consent, anonimitas, dan prinsip non-maleficence: Generalisasi hasil bersifat analitik, bukan statistik.

C. Result and Discussion

1. Kondisi Sosial-Ekonomi Nelayan dan Kerentanan Struktural

Sebagian besar nelayan Desa Senteluk merupakan nelayan tradisional yang mengoperasikan perahu kecil dan alat tangkap sederhana. Ketergantungan pada kondisi cuaca dan hasil tangkapan menyebabkan pendapatan harian tidak stabil. Seorang informan menuturkan:

“Kalau angin kencang, kami tidak bisa melaut. Itu berarti tidak ada uang masuk, sementara kebutuhan tetap jalan.”
(Informan Nelayan 1)

Ketidakpastian pendapatan diperparah oleh kenaikan biaya operasional dan keterbatasan akses permodalan. Temuan ini sejalan dengan literatur yang menegaskan bahwa nelayan kecil berada dalam kerentanan struktural akibat lemahnya posisi tawar ekonomi serta minimnya jaminan sosial.⁷

Sebagian rumah tangga mencoba diversifikasi, misalnya membantu usaha pengolahan hasil laut, namun kemampuan adaptasi ini tidak merata karena keterbatasan keterampilan dan modal.

2. Implementasi Kebijakan Lingkungan dan Program Bantuan

⁷ Satria, A. (2009). Ekologi politik nelayan. LKiS.



Pemerintah desa dan dinas terkait meng-implementasikan sejumlah program: bantuan sarana produksi (mesin perahu, alat tangkap), penguatan UMKM berbasis pesisir, serta edukasi pengelolaan lingkungan. Menurut perangkat desa:

“Program ini berjalan bertahap sesuai ketersediaan anggaran. Prioritasnya tetap untuk masyarakat pesisir yang membutuhkan.”
(Perangkat Desa)

Dari sisi kebijakan, program tersebut konsisten dengan tujuan peningkatan kesejahteraan nelayan sekaligus penguatan keberlanjutan pesisir. Namun, sebagaimana ditegaskan literatur implementasi kebijakan, keberhasilan sangat dipengaruhi oleh kapasitas pelaksana dan proses operasional di tingkat lokal (Hill & Hupe, 2014).

3. Persepsi Manfaat Program

Manfaat program dirasakan nyata oleh sebagian penerima, khususnya pada peningkatan produktivitas UMKM dan efisiensi operasional nelayan. Seorang pelaku UMKM mengatakan:

“Dengan alat pengolahan itu, kualitas produk naik. Sekarang lebih mudah masuk ke pasar oleh-oleh.”
(Pelaku UMKM)

Nelayan penerima bantuan mesin juga menyebut penghematan waktu melaut. Namun, manfaat tersebut tidak dirasakan secara merata di seluruh kelompok nelayan.

4. Ketimpangan Akses dan Ketegangan Persepsi

Sebagian nelayan mengungkapkan belum pernah memperoleh bantuan meski telah mengajukan berulang kali:

“Kami sudah ikut musyawarah dan mengajukan nama, tapi belum pernah terdata sebagai penerima.”
(Informan Nelayan 2)

Sementara pihak desa menegaskan keterbatasan kuota:

“Data penerima disesuaikan kriteria dan kapasitas anggaran. Tidak mungkin semua sekaligus.”



(Perangkat Desa)

Dari sini tampak ketegangan persepsi: pemerintah menekankan rasionalitas administratif, sementara warga menilai dari dimensi keadilan sosial. Literatur menunjukkan bahwa kesenjangan persepsi ini lazim terjadi apabila komunikasi kebijakan kurang terbuka dan partisipasi warga tidak setara.

5. Partisipasi dan Collaborative Governance

Musyawarah desa memang dilaksanakan, tetapi sebagian nelayan menyatakan partisipasi mereka lebih bersifat informatif daripada deliberatif. Seorang informan mengatakan:

“Kami hadir dalam rapat, tapi keputusan soal siapa yang dapat bantuan sudah hampir pasti sebelumnya.”

(Informan Nelayan 3)

Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008) yaitu kolaborasi, kepercayaan, dan pengambilan keputusan bersama belum sepenuhnya terwujud. Akibatnya, keadilan prosedural belum sepenuhnya dirasakan warga.

6. Keadilan Distribusi dan Risiko Konflik Laten

Ketidakmerataan akses tidak serta-merta mengindikasikan adanya praktik diskriminasi, tetapi mencerminkan keterbatasan sumber daya dan kapasitas administratif. Namun, kurangnya transparansi dan dokumentasi publik berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial serta mengikis kepercayaan pada pemerintah desa.⁸

Saat ini, potensi konflik masih berada pada tahap laten, ditahan oleh norma kekerabatan dan solidaritas komunitas. Meski demikian, literatur governance menegaskan bahwa legitimasi kebijakan sangat bergantung pada keadilan distribusi dan transparansi.

⁸ Kusnadi. (2007). Kemiskinan nelayan: Problem dan upaya pemberdayaannya. Graha Ilmu.



7. Integrasi dengan Kerangka Teoretik

Temuan penelitian mengonfirmasi bahwa:

- a. kerentanan nelayan bersifat struktural, bukan sekadar ekologis.⁹
- b. implementasi kebijakan dipengaruhi relasi sosial, bukan hanya desain formal
- c. partisipasi yang tidak setara menurunkan legitimasi governance (Ansell & Gash, 2008);
- d. keadilan distribusi menjadi indikator utama keberhasilan kebijakan sosial-ekonomi pesisir.

Dengan demikian, penilaian kebijakan publik harus mencakup dimensi substantif (manfaat ekonomi) dan prosedural (keadilan, transparansi, partisipasi).

8. Ringkasan Hasil dan Diskusi

- a. Program bantuan berjalan dan memberi manfaat nyata bagi sebagian penerima.
- b. Akses bantuan belum merata, dipengaruhi kapasitas kelompok dan jaringan sosial.
- c. Partisipasi warga masih terbatas pada tingkat konsultasi, bukan deliberasi penuh.
- d. Kerentanan nelayan tetap tinggi meskipun terdapat intervensi program.
- e. Potensi konflik distribusi bersifat laten dan perlu dikelola melalui governance yang inklusif.

D. Conclusion

⁹ Nasution, Z. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003)



Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan lingkungan dan distribusi bantuan sosial-ekonomi pada komunitas nelayan di Desa Senteluk melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan pemerintah seperti dukungan sarana produksi dan penguatan UMKM pesisir telah berjalan dan memberi manfaat nyata bagi sebagian penerima. Namun, akses terhadap bantuan belum sepenuhnya merata akibat keterbatasan kuota, variasi kapasitas administratif kelompok nelayan, serta pengaruh jaringan sosial lokal.

Kerentanan struktural nelayan tetap tinggi karena ketergantungan pada musim, fluktuasi pendapatan, dan keterbatasan modal. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak cukup diukur dari keberadaan program, tetapi juga dari keadilan distribusi, transparansi prosedur, dan partisipasi bermakna dalam proses pengambilan keputusan. Minimnya ruang deliberatif dan dokumentasi informasi publik berpotensi menurunkan legitimasi governance desa serta menciptakan konflik laten berbasis kecemburuan sosial.

Oleh karena itu, kebijakan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi pesisir perlu dirancang secara lebih inklusif melalui penguatan kapasitas kelembagaan nelayan, transparansi pendataan, mekanisme pengaduan publik, serta evaluasi partisipatif. Pendekatan tersebut memungkinkan terwujudnya keseimbangan antara keberlanjutan ekologi dan keadilan sosial bagi masyarakat nelayan.

Sebagai penelitian kualitatif, generalisasi temuan bersifat analitik, bukan statistik. Namun, kedalaman data empiris memberikan kontribusi terhadap pengayaan literatur tentang implementasi kebijakan pesisir dan governance pada tingkat desa.



References

- Allison, E. H., & Ellis, F. (2001). The livelihoods approach and management of small-scale fisheries. *Marine Policy*, 25(5), 377–388. [https://doi.org/10.1016/S0308-597X\(01\)00023-9](https://doi.org/10.1016/S0308-597X(01)00023-9)
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dahuri, R. (2003). *Keanekaragaman hayati laut: Aset pembangunan berkelanjutan Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Fauzi, A. (2010). *Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan: Teori dan aplikasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hill, M., & Hupe, P. (2014). *Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2014). *Studying public policy: Principles and processes* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Kusnadi. (2002). *Nelayan: Strategi adaptasi dan jaringan sosial*. LKiS.
- Kusnadi. (2007). *Kemiskinan nelayan: Problem dan upaya pemberdayaannya*. Graha Ilmu.
- Nasution, Z. (2003). *Pengelolaan wilayah pesisir terpadu*. Pustaka Pelajar.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research and evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Retnowati, E. (2011). Dinamika kemiskinan nelayan dalam perspektif sosial budaya. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 24(2), 101–111.
- Satria, A. (2009). *Ekologi politik nelayan*. LKiS.
- Suyanto, B. (2013). *Sosiologi ekonomi: Kapitalisme dan konsumsi di era masyarakat post-modern*. Prenada Media.

